

**PENEGAKAN KODE ETIK OLEH BADAN KEHORMATAN  
DPRD KABUPATEN SOLOK PERIODE 2019-2021**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MIRA NOVITA SARI**

**BP. 1810831004**



**Pembimbing  
Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## ABSTRAK

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menegakkan kode etik di DPRD Kabupaten Solok. Badan Kehormatan ini sangat penting karena menjaga kehormatan, martabat, citra, dan kredibilitas dari DPRD. Badan kehormatan yang dibentuk untuk menegakkan kode etik anggota DPRD, namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehubungan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengapa Badan Kehormatan gagal dalam menegakkan kode etik dan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pengawasan dan berdasarkan peraturan dan kode etik yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok sudah melakukan tugas dan wewenangnya meskipun masih ada kekurangan sehingga Badan Kehormatan dapat dikatakan belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD namun tidak dilakukan penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan, seperti kasus keributan dan absensi kehadiran anggota dewan. Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya mendapati beberapa kendala diantaranya Badan kehormatan tidak mempunyai keberanian untuk melakukan penegakan kode etik terhadap anggota DPRD yang melanggar kode etik. Ketidakberanian ini dilatarbelakangi oleh rasa kesegaran antara sesama anggota DPRD, terbentur pedoman tata beracara serta faktor lembaga politik sehingga dapat dikatakan BK DPRD Kabupaten Solok gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak kode etik.

**Kata kunci : Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD Kabupaten Solok**

## ABSTRACT

Honorary Board (BK) DPRD Solok regency is one of the parliament complete tools which was formed to uphold the parliament code of ethics. Honorary Board is very important because it maintains the honor, dignity, image credibility. Honorary Board (BK) was formed to uphold the code of ethics for parliament, but doesn't function properly in connection with violations of the code ethics committed by parliament members. This study aim to go into how the implementation of the duties and powers of parliament in Solok Regency. This study uses a qualitative research approach with case study methods. The concept in this research is concept of supervision and based on existing regulations and codes of ethics. The results of this research show that the Honorary Board of the Solok Regency, parlment has performed its duties and powers even though there is still a shortage so that the honorary board can be said to not optimal in performed functions. This can be seen from the still violations of the code ethics committed by members of the parliament but there wasn't enforcement of the code ethics. Such as cases of rioting and absenteeism of council members. Honorary Board in performing it's function found several obstacles, including that the Honorary Board didn't have the courage to enforce the code of ethics against DPRD members who violated the code of ethics. This reluctance was motivated by a sense of relutance among parliament, clashed with procedural guidelines of the legislative guidelines and the weakness of the existing rules and code of ethics, and the absence of clear sanstions for violations of the code of ethics based on laws.

**Keywords :** Honorary Board, code of ethics, Parliament of Solok Regency

